

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan

kemauan untuk melaksanakan otonomi daerah yang dipimpin oleh pemerintah daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut agar selalu tanggap terhadap keadaan tuntutan lingkungannya.

Saat ini masalah kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sudah menjadi perhatian setiap masyarakat. Sering kali media menginformasikan berita tentang masyarakat yang melakukan aksi protes karena kinerja pemerintah yang buruk. Banyak indikator yang bisa menjadi patokan untuk menilai kinerja pemerintah, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusianya. Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus didukung dengan latar belakang pendidikan yang baik dan sesuai bidangnya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, haruslah diadakan pendidikan dan pelatihan. Kualitas yang

minim dari sumber daya manusia pemerintahan dapat mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan kerja dan mencapai tujuan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto (1995:7) dalam Febriady (2013), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat menjadi lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Selain kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian Eka Widyaningtyas (2014) disebutkan jika pengendalian intern lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan sangat besar. Oleh sebab itu dalam lingkup pemerintah diperlukanlah sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan unsur penting dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Melihat pentingnya kinerja pemerintah, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai indikator pengukur kinerja pemerintah dengan kajian penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali)”**

B. Rumusan Masalah

Kinerja pemerintah yang baik merupakan hal yang sangat dituntut oleh masyarakat, karena kinerja pemerintah menentukan kesejahteraan masyarakat. Saat ini masyarakat Indonesia sedang krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap sewenang-wenang dalam menggunakan otoritas dan manajemen sektor publik. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, akademisi dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang kualitas sumber

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada setiap SKPD yang berada pada wilayah pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dan meningkatkan kualitas kinerja dalam masing-masing SKPD.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya dan menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan deskripsi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data dan metode analisisnya.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskripsi dari objek yang diteliti, penjelasan atau pembahasan mengenai hasil perhitungan atau analisis data dengan metode analisisnya serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran yang hendak disampaikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan.